

**PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA BANDAR LAMPUNG OLEH
DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Mia Ayu Asari
1616041019



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

**PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA BANDAR LAMPUNG OLEH
DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)**

Oleh

Mia Ayu Asari

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA BANDAR LAMPUNG OLEH DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)

Oleh

Mia Ayu Asari

Berdasarkan *Online Data System* Kementerian Koperasi dan UMKM RI Tahun 2021 jumlah UMKM di Provinsi Lampung dengan 15 kabupaten/kota berjumlah 157.120 usaha dengan rincian setiap kabupaten/kota sebagai berikut : 1). Lampung Barat 2.643, 2). Tanggamus 186, 3). Lampung Selatan 701, 4). Lampung Timur 650, 5). Lampung Tengah 796, 6). Lampung Utara 457, 7). Way Kanan 840, 8). Tulang Bawang 633, 9). Tulang Bawang Barat 179, 10). Pesawaran 482, 11). Mesuji 4.287, 12). Pringsewu 1.967, 13). Pesisir Barat 912, 14). Bandar Lampung 118.533, 15). Metro 23.854. Dan untuk jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung sendiri berjumlah kurang lebih 118.533 yang tersebar di 20 kecamatan dengan 82% UMKM mengoptimalkan aktivitas penjualannya menggunakan sistem penjualan *online* melalui outlet masing-masing pelaku UMKM di *platform e-commerce* dan lapak media sosial. Melihat jumlah UMKM yang cukup potensial menjadi salah satu alasan perlunya untuk memberdayakan UMKM di Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat Kota Bandar Lampung. Namun pada keadaan dilapangan dalam proses pemberdayaan masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi pelaku usaha mulai dari keterbatasan modal hingga sumber daya manusia yang kurang memadai. Oleh karena itu dibutuhkan campur tangan lembaga pemerintahan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk membantu memberdayakan UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung berdasarkan fokus penelitian yang digunakan masih belum maksimal. Kegiatan yang dilakukan hanya sebatas penyelenggaraan kegiatan pengarahan, pelatihan, pendampingan dan pemberian modal namun tidak dilakukan secara berkala sehingga hasil yang ditimbulkan belum maksimal.

Kata Kunci: Pemberdayaan, UMKM.

ABSTRACT

DEVELOPMENT OF UMKM IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG BY THE COPERATIVE AND UKM DINAS OF THE CITY OF BANDAR LAMPUNG (Study at the Cooperative and SME Agency of Bandar Lampung City)

**By
Mia Ayu Asari**

Based on the Online Data System of the Ministry of Cooperatives and UMKM of the Republic of Indonesia in 2021, the number of UMKM in Lampung Province with 15 districts / cities amounted to 157,120 businesses with details of each district / city as follows: 1). West Lampung 2,643, 2). Tanggamus 186, 3). South Lampung 701, 4). East Lampung 650, 5). Central Lampung 796, 6). North Lampung 457, 7). Way Kanan 840, 8). Tulang Bawang 633, 9). West Tulang Bawang 179, 10). Pesawaran 482, 11). Mesuji 4,287, 12). Pringsewu 1,967, 13). West Coast 912, 14). Bandar Lampung 118,533, 15). Metro 23,854. And for the number of UMKM in Bandar Lampung City itself, there are approximately 118,533 spread across 20 sub-districts with 82% of UMKM optimizing their sales activities using an online sales system through their respective outlets on e-commerce platforms and social media stalls. Seeing the number of potential UMKM is one of the reasons for the need to empower UMKM in Bandar Lampung City with the aim of increasing income and prospering the people of Bandar Lampung City. However, in the field in the empowerment process there are still various problems faced by business actors ranging from limited capital to inadequate human resources. Therefore, it requires the intervention of government institutions as parties who have the responsibility to help empower UMKM in Bandar Lampung City. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach.

The conclusion of this research is that the empowerment of UMKM carried out by the Cooperative and UKM Office of Bandar Lampung City based on the research focus used has not been maximized. The activities carried out are only limited to organizing briefing activities, training, mentoring and providing capital but are not carried out regularly so that the results generated are not optimal.

Keywords: Empowerment, UMKM.

Judul Skripsi

: **PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA BANDAR
LAMPUNG OLEH DINAS KOPERASI DAN
UKM KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota
Bandar Lampung)**

Nama mahasiswa

: **Mia Ayu Asari**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1616041019**

Program Studi

: **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas

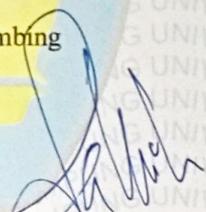
: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



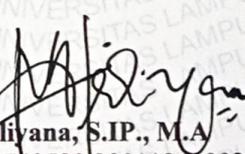
MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Bambang Utoyo S, M.Si
NIP. 19630206 198803 1 002


Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si
NIP. 19880712 201903 1 012

2. **Ketua Jurusan Administrasi Negara**


Meiliyana, S.IP., M.A
NIP. 19740520 200112 2 002

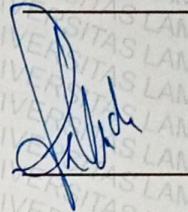
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

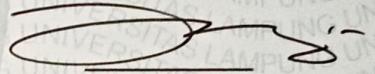
Ketua : **Dr. Bambang Utoyo S, M.Si**



Sekretaris : **Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si**



Anggota : **Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Nurhaida, M.Si

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **30 Mei 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, Selasa 30 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,



Mia Ayu Asari
NPM 1616041019

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Mia Ayu Asari, lahir pada tanggal 13 Mei 1997 di Desa Semidang Alas, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Rapani dan Ibu Tati Murni. Memiliki satu orang kakak laki-laki dan dua orang adik laki-laki. Penulis memulai pendidikan formal di SDN 15 Desa Semidang Alas tahun 2003 dan lulus Pada tahun 2010.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 7 Pengaringan dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Pagar Alam dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Berkat petunjuk dan rahmat dari Allah SWT, do'a dan dukungan dari kedua orang tua serta keluarga yang terkasih, dalam menjalankan aktivitas pendidikan di Universitas Lampung, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul "Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung (studi pada dinas koperasi dan umkm kota bandar lampung)".

MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyahkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah SWT hingga ia kembali”

(HR Tirmidzi)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra'd:11)

“Kamu tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu, masa lalu ada bukan untuk sebuah penyesalan namun sebuah proses untuk mencapai masa depan yang lebih baik”

(Mia Ayu Asari)

PERSEMBAHAN



Yang paling utama dari segalanya maha suci **Allah SWT**, Tuhan semesta alam. Sembah sujud serta syukur kepada **Allah SWT** yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu serta menunjukkan setiap jalan yang saya lewati. Atas karunia dan kehendak serta kemudahan yang **Engkau** berikan akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Sholawat & salam tak lupa selalu tercurah kepada **Rasulullah Muhammad SAW** Teriring rasa syukur atas limpahan nikmat-**Nya** tak terhingga, kupersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku

Ayahanda **RAPANI** dan Ibunda **TATI MURNI**. Sebagai tanda bakti dan rasa terima kasih atas jerih payah yang engkau berikan untukku, setiap do'a, semua kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga dan tiada mungkin dapat kubalas, semoga Allah memuliakan, menyayangi, dan melimpahkan segala kebaikan dunia dan akhirat untuk kalian.

Keluargaku (Kakak, Kakak Ipar, Adik-Adikku dan keponakanku)

Terima kasih atas dukungan, semangat, dan selalu mendoakan yang terbaik untukku. Semoga Allah SWT selalu memberikan hubungan yang harmonis diantara kita.

Untuk orang yang terkasih yang jauh di jarak tapi dekat di hati, terima kasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah, dan yang tak pernah lelah memberikan wejangan. Percayalah aku disini menantimu dalam do'a dan diamku. Semoga keyakinan dan takdir Allah SWT terwujud, insyaAllah kita bisa bersama atas ridho dan izin Allah SWT.

Ucapan terima kasih kepada Keluarga Besarku dan Orang-orang terkasih Sahabat,
dan Teman-teman yang mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak serta
memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Yang telah memberikan dukungan
moril dan materi serta do'a.

**Para Pendidik dan Civitas Akademika Yang Ku-Hormati
Almamater tercinta**

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil dihari akhir kelak. Berkat daya dan upayaserta kekuatan yang dianugerahkan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.AN) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si. selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, ilmu dan waktu yang telah bapak berikan selama perkuliahan dan bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah SWT atas ilmu yang telah bapak berikan kepada saya.
2. Bapak Dodi Faedluloh, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih atas saran, masukan, bimbingan dan arahannya serta ilmu dan waktu yang telah bapak berikan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah SWT atas ilmu yang telah bapak berikan kepada saya.
3. Prof.Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku dosen Pembahas dan Penguji. Terima kasih atas saran, masukan, nasehat serta ilmu dan waktu yang telah

diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga bapak selalu di berikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah SWT.

4. Dr. Dedy Hermawan, S.Sos. M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik serta seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih atas segala ilmu yang telah yang telah diberikan selama proses perkuliahan semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan peneliti kedepannya.
5. Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Meiliyana, S. IP., M.A. selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara.
7. Terima kasih kepada Mba Wulan, Mas Hendro dan Pak Juhari selaku Staf Administrasi yang telah menjadi tempat bertanya dan banyak membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini. Semoga dimudahkan segala urusannya.
8. Terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, kakak (Tedy), kakak ipar (Tri), adik-adiku (Dodi dan Tio) serta kedua keponakanku (Faqi dan Nindy) yang selalu memberikan kasih sayang, perhatiannya, nasehat, motivasi, dukungan, serta do'a dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
9. Teruntuk seseorang yang spesial terima kasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah, yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik dari segi moril maupun materil.
10. Teman-temanku tersayang Winda Agustin, Siti Komariah dan Meilani Syarifa terima kasih sudah banyak berproses bersama, terimakasih telah memberi semangat kepada penulis ,selalu membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.
11. Untuk temanku (Cenglu) Adelia Martina dan Rizka Ananda Maharani .Terima kasih atas waktu, kebersamaan, dukungan, do'a, kebaikan, perhatian, canda tawa, dan banyak hal yang kita lewati. Bersama kalian merupakan hal yang kususyukuri dan kenangan yang indah bisa dipertemukan oleh kalian. Kebersamaan kita merupakan kenangan

indahku semasa kuliah, tanpa kalian semasa kuliahku takan menyenangkan ini. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita, juga menghendaki pertemuan kita ke syurga-Nya Aamiin.

12. Terimakasih kepada pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dan seluruh pihak yang menjadi objek dalam penulisan skripsi ini yang telah membantu melancarkan proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih untuk segala kebaikan yang telah diberikan kepadaku semoga Allah selalu membalas kebaikan kalian.
13. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini tanpa terkecuali, yang tidak dapat ditulis satu persatu. Terimakasih untuk waktu, dukungan, bantuan, dan do'anya.
14. Terima kasih untuk teman-teman Alaska atas kebersamaannya selama menepuh pendidikan di jurusan Ilmu Administrasi Negara ini.
15. Terima kasih kepada Almamater Unila tercinta atas segala ilmu yang telah diberikan, semoga kedepannya Unila semakin jaya.
16. Terimakasih kepada diriku karena tak pernah berhenti meski rintangan menghalangi. Selalu menjadi motivator untuk diri sendiri. Terimakasih karena selalu bertahan dan tidak memilih untuk menyerah.

Bandar Lampung, 13 Mei 2023

Penulis,

Mia Ayu Asari

DAFTAR ISI

| | halaman |
|---|----------------|
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| | |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 7 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1. Penelitian Terdahulu | 8 |
| 2.2. Konsep Pembangunan Ekonomi | 9 |
| 1 Definisi Pembangunan Ekonomi | 9 |
| 2 Peranan Pertumbuhan UMKM Terhadap Pembangunan Ekonomi | 10 |
| 2.3. Konsep Pemberdayaan..... | 11 |
| 1 Definisi Pemberdayaan | 11 |
| 2 Tujuan Pemberdayaan | 13 |
| 3 Proses Pemberdayaan..... | 15 |
| 4 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat | 18 |
| 5 Peranan Metodologi dan Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat | 20 |
| 2.4. Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 21 |
| 2.5. Pemberdayaan UMKM | 24 |
| 2.6. Konsep Peran | 26 |
| 1. Definisi Peran | 26 |
| 2. Jenis-Jenis Peran..... | 27 |
| 3. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM..... | 28 |
| 2.7. Kerangka Fikir | 29 |
| | |
| III. METODE PENELITIAN | 31 |
| 3.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian | 31 |
| 3.2. Fokus Penelitian..... | 32 |
| 3.3. Lokasi Penelitian..... | 33 |
| 3.4. Sumber Data Penelitian | 33 |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data..... | 34 |
| 1 Wawancara Terstruktur | 34 |
| 2 Observasi | 35 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 3 | Dokumentasi | 35 |
| 3.6. | Teknik Analisis Data | 36 |
| 1 | Klasifikasi Data | 36 |
| 2 | Penyajian Data | 36 |
| 3 | Penarikan Kesimpulan/Verifikasi | 37 |
| 3.7. | Teknik Keabsahan Data | 37 |
| 1 | Perpanjangan Pengamatan | 37 |
| 2 | Triangulasi..... | 37 |
| IV. | HASIL DAN PEMBAHASAN | 39 |
| 4.1. | Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 39 |
| 1 | Sejarah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung | 39 |
| 2 | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, dan Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung..... | 39 |
| 3 | Sumber Daya Manusia | 42 |
| 4 | Tugas, Pokok dan Fungsi | 42 |
| 4.2. | Hasil Penelitian | 47 |
| 1 | <i>Enabling</i> | 47 |
| 2 | <i>Empowering</i> | 51 |
| 3 | <i>Protecting</i> | 53 |
| 4 | Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung..... | 55 |
| 4.3. | Pembahasan | 56 |
| 1 | Proses Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Bandar Lampung..... | 57 |
| 1) | <i>Enabling</i> | 58 |
| 2) | <i>Empowering</i> | 61 |
| 3) | <i>Protecting</i> | 64 |
| 2 | Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung..... | 67 |
| V. | KESIMPULAN DAN SARAN | 70 |
| 5.1. | Kesimpulan | 70 |
| 5.2. | Saran | 71 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| Tabel | halaman |
|--|----------------|
| 1 Jumlah UMKM per Kecamatan Tahun 2021 | 4 |
| 2 Kajian Penelitian Terdahulu..... | 8 |
| 3 Informan Penelitian..... | 34 |
| 4 Data Dokumen Penelitian | 35 |
| 5 Kegiatan Point <i>Enabling</i> | 51 |
| 6 Kegiatan Point <i>Empowering</i> | 53 |
| 7 Kegiatan Point <i>Protecting</i> | 55 |
| 8 Jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung..... | 60 |
| 9 Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2022 | 67 |
| 10 Pelaku UMKM sebagai Informan | 69 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | halaman |
|--|----------------|
| 1 Kerangka Fikir | 30 |
| 2 Kegiatan FGD Pemberdayaan UKM | 49 |
| 3 Kegiatan FGD Peranan UKM Berbasis Digital | 49 |
| 4 Penyuluhan Design Produk Bagi Pelaku UMKM (<i>Hendycraf</i>) | 49 |
| 5 Pelatihan Produk Halal Bagi Pelaku UMKM | 50 |

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Keadaan perekonomian masyarakat Indonesia yang tidak stabil dan masih berada pada level menengah kebawah membuat kebutuhan masyarakat tidak dapat terpenuhi dengan maksimal. Masyarakat yang berpenghasilan rendah menjadi salah satu faktor hal tersebut terjadi dan ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang dampaknya tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat tapi turut mempengaruhi perekonomian negara. Berdasarkan perhitungan *year on year* pertumbuhan ekonomi melemah yaitu pada triwulan pertama tahun 2020 dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan pada tahun 2019 triwulan pertama yang sebesar 5,07%. selanjutnya pada triwulan kedua mengalami kemunduran yaitu sebesar 5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Pada triwulan ketiga data menunjukkan bahwa terdapat kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49% sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari menurunnya persentase ekonomi di Indonesia mengakibatkan beberapa masalah seperti salah satunya adalah angka pengangguran menjadi meningkat dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi Covid-19 (<https://bem.fmipa.unej.ac.id/kastrad-beraksi2-kondisi-perekonomian-indonesia-di-tengah-pandemi-covid-19/> , 22 Mei 2021 dengan judul artikel Kondisi Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi, diakses tanggal 23 Juli 2022).

Hal ini juga terjadi di Provinsi Lampung tak terkecuali Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2021 bahwa dampak dari pandemi membuat turunya kinerja ekonomi Lampung ini terjadi sejak triwulan I tahun 2020 yang tercermin

dari laju pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 yang hanya mencapai 1,74% dan kembali menurun signifikan pada triwulan II tahun 2020 yang tumbuh minus 3,57%. Banyaknya perusahaan yang melakukan PHK kepada pegawainya membuat sebagian masyarakat kehilangan pekerjaannya yang mempengaruhi pendapatan mereka dengan begitu pemasukan untuk memenuhi kebutuhan menjadi berkurang sebanyak kurang lebih terdapat 1.091 orang yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari tempat mereka bekerja (www.rmollampung.id, diakses tanggal 25 Juli 2022). Sulitnya mencari pekerjaan baru membuat masyarakat yang terkena PHK mencoba untuk membuka usaha dengan skala mikro hingga menengah agar tetap bisa memiliki pemasukan yang mana kegiatan ini biasa dikenal dengan istilah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM sendiri merupakan usaha produktif yang kepemilikan usahanya dapat dimiliki secara perorangan ataupun badan usaha yang telah memenuhi syarat atau kriteria sebagai usaha mikro.

Selain itu UMKM juga memiliki peran yang cukup strategis dalam pembangunan ekonomi daerah serta dapat membuka lowongan pekerjaan baru bagi orang lain. Melihat peristiwa ini Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung mencoba melakukan upaya yaitu dengan meningkatkan pada pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar usaha yang dibangun oleh masyarakat dapat lebih berkembang dan dengan harapan dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki perekonomian masyarakat serta laju ekonomi di Kota Bandar Lampung. Siagian (Pertiwi dkk, 2013:214) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peranan penting dalam lima wujud utama yaitu, Pertama selaku stabilisator, peran pemerintah sebagai stabilisator sangat penting dan harus dimainkan secara efektif. Kedua, selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Ketiga, selaku modernisator, pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakat ke arah kehidupan yang modern. Keempat, selaku pelopor, pemerintah harus

menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Kelima, selaku pelaksana sendiri, pemerintah masih dituntut untuk berperan sebagai pelaksana sendiri berbagai kegiatan. Sebagai pelaksana otonomi daerah khususnya dibidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung diharapkan mampu untuk dapat melaksanakan sebagian tanggung jawab pemerintah yaitu meliputi kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pemberdayaan usaha mikro. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung diharapkan mampu menjadi wadah dengan mengembangkan UMKM di Kota Bandar Lampung melalui program kerja atau upaya yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga UMKM di Kota Bandar Lampung dapat terus terjadi peningkatan yang dengan begitu dapat membantu memperbaiki pendapatan para pelaku UMKM.

Pemberdayaan UMKM dipilih menjadi salah satu alternatif oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya untuk mengurangi pengangguran, mengentas kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pemberdayaan UMKM juga dapat menjadi media dalam pemberdayaan masyarakat dimana pemberdayaan merupakan salah satu tugas pemerintah untuk memberikan dukungan secara nyata agar masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada dengan pengembangan usaha lokal serta terus melakukan inovasi secara mandiri hingga usaha yang dijalankan tersebut dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dilakukan dengan tujuan yang tercantum di Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu pada pasal 3 dengan bunyi : a). Untuk mewujudkan dan menumbuhkan kewirausahaan UMKM yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan berakar dalam masyarakat; b). Menciptakan iklim usaha yang kondusif pada berbagai tingkatan pemerintahan agar UMKM dapat berdaya saing

dalam dan luar negeri; c). Meningkatkan akses-akses dari pelaku UMKM terhadap sumber-sumber daya yang bersifat produktif; dan d). Mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal. Selain itu pemberdayaan UMKM juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan seperti pemberian pembinaan serta perlindungan usaha, memberikan dorongan dan memantapkan organisasi, manajemen serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

Berdasarkan *Online Data System* Kementerian Koperasi dan UMKM RI Tahun 2021 jumlah UMKM di Provinsi Lampung dengan 15 kabupaten/kota berjumlah 157.120 usaha dengan rincian setiap kabupaten/kota sebagai berikut : 1). Lampung Barat 2.643, 2). Tanggamus 186, 3). Lampung Selatan 701, 4). Lampung Timur 650, 5). Lampung Tengah 796, 6). Lampung Utara 457, 7). Way Kanan 840, 8). Tulang Bawang 633, 9). Tulang Bawang Barat 179, 10). Pesawaran 482, 11). Mesuji 4.287, 12). Pringsewu 1.967, 13). Pesisir Barat 912, 14). Bandar Lampung 118.533, 15). Metro 23.854. Dan untuk jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung sendiri berjumlah kurang lebih 118.533 yang tersebar di 20 kecamatan dengan 82% UMKM mengoptimalkan aktivitas penjualannya menggunakan sistem penjualan *online* melalui outlet masing-masing pelaku UMKM di *platform e-commerce* dan lapak media sosial (Kupastuntas.co, diakses 25 Juli 2022). Berikut jumlah UMKM per kecamatan di Kota Bandar Lampung :

Tabel 1. Jumlah UMKM per Kecamatan Tahun 2021

| No | Kecamatan | Usaha Mikro | Usaha Kecil | Usaha Menengah |
|-----|----------------------|-------------|-------------|----------------|
| 1. | Teluk Betung Barat | 1562 | 654 | 220 |
| 2. | Teluk Betung Timur | 1405 | 788 | 301 |
| 3. | Teluk Betung Selatan | 1743 | 798 | 236 |
| 4. | Bumi Waras | 1930 | 686 | 271 |
| 5. | Panjang | 2125 | 917 | 268 |
| 6. | Tanjung Karang Timur | 1713 | 712 | 246 |
| 7. | Kedamaian | 1857 | 732 | 287 |
| 8. | Teluk Betung Utara | 2043 | 636 | 291 |
| 9. | Tanjung Karang Pusat | 3167 | 893 | 342 |
| 10. | Enggal | 1672 | 945 | 240 |

| No | Kecamatan | Usaha Mikro | Usaha Kecil | Usaha Menengah |
|-----|----------------------|-------------|-------------|----------------|
| 11. | Tanjung Karang Barat | 1656 | 794 | 241 |
| 12. | Kemiling | 2837 | 856 | 232 |
| 13. | Langkapura | 1465 | 721 | 261 |
| 14. | Kedaton | 1913 | 845 | 309 |
| 15. | Rajabasa | 1709 | 714 | 270 |
| 16. | Tanjung Senang | 1487 | 789 | 326 |
| 17. | Labuhan Ratu | 2121 | 826 | 257 |
| 18. | Sukarame | 1860 | 915 | 267 |
| 19. | Sukabumi | 1514 | 676 | 316 |
| 20. | Way Halim | 2200 | 683 | 266 |

Sumber : Statistik Sektor Kota Bandar Lampung Tahun 2021, 2022.

Data diatas memperlihatkan bahwa UMKM di Kota Bandar Lampung memiliki potensi dan eksistensi yang cukup besar untuk diberdayakan dengan jumlah yang tidak sedikit dari beragam jenis usaha. Hal tersebut juga dipengaruhi dari adanya PHK di massa pandemi membuat masyarakat beralih profesi menjadi pelaku UMKM salah satu UMKM yang sudah cukup besar yaitu UMKM Keripik Shinta, Cafee OOPS Pujasera dan yang lainnya. Namun disisi lain UMKM khususnya di Kota Bandar Lampung masih memiliki banyak keterbatasan sehingga memerlukan perhatian dan dukungan lebih dari pihak-pihak yang memiliki wewenang agar usaha yang dilakukan lebih terarah.

Permasalahan yang dihadapi yaitu keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha dan para pelaku usaha belum melakukan dengan baik pencatatan atas laporan keuangan usahanya akibatnya membuat keadaan keuangan dalam usaha kurang stabil, kualitas sumber daya manusia yang rendah dikarenakan terdapat beberapa pelaku usaha yang kemampuan dasarnya dan pengalaman bekerjanya bukan pada bidang usaha yang membuat pelaku usaha cukup kesulitan untuk beradaptasi saat membuka usaha, produktivitas dan kualitas produk yang rendah yang mana hal ini dikarenakan kualitas SDM yang kurang mumpuni sehingga mempengaruhi hasil dari produk yang dibuat, cukup sulitnya membuat perizinan usaha yang mencakup aspek legalitas usaha, serta minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang diketahui bahwa pelaku usaha

bukan hanya dari kalangan usia muda namun juga terdapat pelaku usaha yang sudah cukup usia serta kesadaran pelaku UMKM yang masih minim dalam menerima dan menerapkan informasi terkait penggunaan teknologi sehingga penggunaan teknologi belum dapat digunakan secara maksimal.

Permasalahan-permasalahan di atas menjadi PR bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kinerja dalam melakukan pengelolaan UMKM di Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sangat diperlukan agar UMKM di Kota Bandar Lampung tetap berjalan yaitu melalui inovasi program kerja yang diwujudkan dengan pengenalan, sosialisasi produk-produk UMKM, memfasilitasi pengurusan berkas-berkas perizinan UMKM, memberikan pinjaman tanpa bunga hingga menyediakan lapak usaha. Tapiapakah upaya-upaya tersebut yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah memberikan dampak kepada seluruh pelaku UMKM atautkah hanya sebagian pelaku UMKM atau belum sama sekali.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melihat perubahan atau dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian lebih detail dengan judul **“Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberdayaan pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung ?

2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemberdayaan UMKM di kota Bandar Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui proses pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menilai hasil atau capaian dari pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung serta apa saja yang menjadi faktor penghambatnya. Dan setelah melakukan penelitian ternyata yang menjadi faktor penghambat ialah Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan modal, kurang berpihaknya pemerintah terhadap UMKM di Kota Bandar Lampung di tandai dengan belum adanya regulasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperluas teori tentang pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta kontribusi pemikiran dalam melakukan kajian atau penelitian lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat atau masalah lainnya yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis melalui saran-saran yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini dapat membuat Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memiliki masukan lain dalam melakukan pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung serta dapat menjadi pengetahuan bagi pembaca serta masyarakat luas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang penelitian dengan judul tersebut, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai panduan, acuan atau tolak ukur dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian terdahulu bermanfaat karena dapat dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menentukan langkah-langkah sistematis baik dari segi konsep ataupun teori dalam proses penyusunan penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi :

Tabel 2. Kajian Penelitian Terdahulu

| NO | NAMA | PERBEDAAN PENELITIAN | HASIL |
|----|---|--|--|
| 1. | Kiky Fahriza, Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid 19) di Pekanbaru Tahun 2021. | Teknik pengumpulan data dan Narasumber yang di wawancara tidak mencantumkan pelaku UMKM. | Pada penelitian yang dilakukan oleh Kiky Fahriza menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan UMKM saat masa pandemi Covid-19 telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui beberapa program hanya saja dampak yang ditimbulkan belum begitu signifikan. Hal tersebut dikarenakan kondisi masa pandemi yang membatasi segala aktivitas sehingga banyak program yang belum teralisasi secara maksimal. |
| 2. | A.Muhammad Farid Said, Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Dinas KOPERINDAG Kabupaten Maros (Studi Pada Sektor Perdagangan) Tahun 2015. | Luas jangkauan fokus penelitian yang diteliti. | Penelitian oleh Farid dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan penelitian menggunakan teori strategi yaitu fase inisial dan fase partisipatoris dengan hasil penelitian bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas KOPERINDAG Kabupaten Maros tidak berjalan optimal karena pola pikir pelaku UMKM yang hanya fokus pada hasil namun minim dalam berproses. |

| NO | NAMA | PERBEDAAN PENELITIAN | HASIL |
|----|--|--|--|
| 3. | Samantha Immanuel Panjaitan, Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan) Tahun 2019. | Luas jangkauan fokus penelitian yang diteliti. | Penelitian yang dilakukan oleh Samantha menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menunjukkan hasil bahwa pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan sudah mampu meningkatkan pengembangan UMKM dari berbagai aspek seperti kualitas dan kuantitas produk serta peningkatan keuntungan usaha. Namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam aspek lain pemberdayaan yaitu pemanfaatan teknologi, bantuan permodalan dan kemampuan SDM yang belum maksimal dan merata. |

2.2.Konsep Pembangunan Ekonomi

1. Definisi Pembangunan Ekonomi

Konsep pada penelitian ini mengenai pemberdayaan UMKM dimana UMKM memiliki pengaruh dalam pembangunan ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk atau masyarakat. Schumpeter (Samantha, 2019:8) berpendapat bahwa salah satu yang menentukan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara ialah kemampuan penduduknya yang mampu berwirausaha karena wirausahawan memiliki kemampuan dan keberanian untuk memulai produksi dari penemuan-penemuan baru dalam aktivitas produksi.

Namun dalam pelaksanaannya para pelaku usaha membutuhkan dukungan atau pendampingan dari pihak yang memiliki wewenang agar dampak bagi pembangunan ekonomi sedikit banyak dapat terlihat. Todaro (Hasan dan Azis, 2018:28) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan dan pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, perubahan mental-mental dari sebuah kebiasaan yang didukung oleh

lembaga-lembaga nasional dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan.

Pembangunan ekonomi ialah pertambahan pendapatan masyarakat yang mempunyai tiga sifat penting yaitu : Pertama, suatu proses yang membawa perubahan secara terus menerus atau berkelanjutan. Kedua, upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Ketiga, sifat penting yang ketiga ini masih memiliki hubungan dengan poin kedua bahwa peningkatan pendapatan perkapita tersebut harus terus berlangsung dalam jangka panjang (Suryani, 2006:95).

Berdasarkan definisi diatas mengenai pembangunan ekonomi dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses atau upaya dalam peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang salah satunya dilakukan oleh para pelaku usaha yang melibatkan lembaga nasional sebagai pendamping agar dapat membawa perubahan secara berkelanjutan.

2. Peranan Pertumbuhan UMKM Terhadap Pembangunan Ekonomi

Pada saat ini usaha mikro, kecil dan menengah sedang menjadi perhatian dari pemerintah daerah karena dapat berpengaruh pada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi berbasis UMKM membuka kesempatan untuk masyarakat membuka usaha industri kreatif dengan ide-ide baru yang memiliki potensi dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan kuantitas barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara cepat apabila pihak yang memiliki wewenang memfokuskan pada sektor usaha kreatif yaitu UMKM. Pada usaha kreatif di dalamnya tidak perlu menciptakan tenaga kerja dengan kualifikasi yang memadai seperti dari segi pendidikan, lokasi usaha dapat disediakan dengan anggaran seminim mungkin, tidak memerlukan properti dengan teknologi canggih, dan sebagainya dengan syarat yang lebih mudah. Usaha kreatif dan inovatif merupakan konsep

yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat mempertemukan kluster-kluster kreatif dengan perusahaan publik maupun swasta. Keterlibatan pihak swasta dan publik dapat menjadi suatu kolaborasi yang besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM agar dapat terus berkembang dan berkelanjutan. UMKM yang berkembang akan menjadi pemasukan tambahan bagi yaitu pelaku usaha serta dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat lain.

Pernyataan lain dari Navastara (dalam Halim, 2020:164) mengatakan bahwa kebijakan yang dipandang tepat dan strategis dalam rangka melakukan pembangunan potensi suatu wilayah adalah salah satunya dengan melakukan pengembangan pada sektor ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu proses mencoba dengan merumuskan kelembagaan-kelembagaan daerah, peningkatan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut terutama sumber daya manusia guna menciptakan produk-produk unggulan, mencari pangsa pasar, pemberian informasi mengenai pengetahuan penggunaan teknologi, serta melakukan pembinaan dan pendampingan.

Peranan UMKM dalam mendorong pembangunan ekonomi memiliki peran yang cukup berpengaruh terutama pada penyerapan tenaga kerja yang masih bisa diandalkan. Runtuhnya industri skala menengah ke atas termasuk dampak dari pandemi yaitu PHK di sebagian perusahaan membuat menjadi pelaku usaha dengan membuka UMKM merupakan pilihan yang paling rasional.

2.3.Konsep Pemberdayaan

1. Definisi Pemberdayaan

Pada penelitian ini konsep pemberdayaan menjadi konsep utama bagi peneliti dalam menentukan fokus penelitian. Pemberdayaan sendiri memiliki arti yaitu membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menentukan kapasitas

dan masa depan mereka. Konsep utama dalam pemberdayaan tentang bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitas atau kelompoknya. Sedarmayanti (Sulandjari, 2021:37) menjelaskan secara harfiah bahwa kata pemberdayaan dapat diartikan sebagai keadaan yang lebih berdaya dari keadaan sebelumnya baik dalam hal wewenang, tanggung jawab maupun kemampuan individual yang dimilikinya sehingga dengan adanya pemberdayaan membuat masyarakat menjadi lebih cepat dan fleksibel dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi karena adanya dorongan dalam bentuk inisiatif dan respon.

Selain itu pendapat Rusmiyati (Sulandjari, 2021:39) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses mengarahkan masyarakat untuk meningkatkan potensi yang dimiliki agar mampu menguasai kehidupannya dengan melibatkan orang atau lembaga yang memiliki kekuatan untuk berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut. Sedangkan menurut Sulistiyani (Sulandjari, 2021:40) pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang kurang berdaya dan pihak yang kurang berdaya ialah masyarakat. Sementara Wrihatnolo & Nugroho (Musa, 2017:116) menyatakan bahwa konsep pemberdayaan mencakup tiga pengertian yaitu : *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community-based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat) dan tahap selanjutnya muncul istilah *community-driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ialah suatu proses meningkatkan atau mengembangkan menuju keadaan yang lebih berdaya atau pemberian daya kepada masyarakat dalam bentuk kelompok, komunitas atau

organisasi seperti dalam hal tanggung jawab atau kemampuan dengan didukung oleh pihak yang memiliki kemampuan yang lebih kuat dan berpengaruh guna melakukan pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat. Secara tidak langsung pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan pihak lain yang memiliki daya dapat membantu membangun daerah agar lebih stabil dari sisi ekonomi ataupun sosial.

2. Tujuan Pemberdayaan

Pada dasarnya pemberdayaan dilakukan untuk memperlihatkan dan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan atau meningkatkan potensi yang dimilikinya dengan tujuan untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa tidak ada satupun masyarakat yang tidak memiliki potensi atau kompetensi, masyarakat manapun memiliki potensi dalam dirinya masing-masing hanya saja terkadang masyarakat tidak menyadarinya dan tidak mengetahui bagaimana cara untuk menyalurkannya. Oleh karena itu potensi tersebut harus terus digali dan dikembangkan melalui upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya salah satunya dengan cara pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah.

Tujuan dari pemberdayaan (Sulandjari, 2021:42-44) antara lain adalah untuk pembentukan masyarakat agar dapat memberdayakan potensi yang ada dan memperkuat potensi tersebut sehingga masyarakat dapat mengatasi berbagai ketertindasan dalam aspek ekonomi. Terdapat beberapa prinsip dalam pemberdayaan yaitu pemberdayaan memiliki prinsip kesetaraan yang berarti masyarakat memiliki kedudukan atau kesejajaran dengan lembaga atau instansi yang menyelenggarakan program. Prinsip yang kedua yaitu prinsip partisipasi dimana program pemberdayaan yang dilakukan dapat membangun kemandirian

masyarakat melalui program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun agar masyarakat dapat sampai pada tahap tersebut diperlukan waktu dan proses pendampingan secara berkelanjutan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Prinsip yang ketiga ialah keswadayaan atau kemandirian, yaitu dengan selalu mengutamakan kemampuan masyarakat terlebih dahulu daripada bantuan pihak lain. Prinsip yang terakhir adalah berkelanjutan, yaitu program pemberdayaan yang telah dirancang merupakan program yang diterapkan secara berkelanjutan atau tidak terputus dengan begitu peran pihak sebagai pendamping akan berkurang dan peran masyarakat akan menjadi lebih dominan dan akhirnya peran pendamping akan sangat berkurang hingga dihapus karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya mandiri.

Tujuan utama dari pemberdayaan menurut Soerjono Soekanto (Sulandjari, 2021:44) adalah untuk memperkuat kekuasaan dari masyarakat yang lemah, tidak memiliki keberdayaan yang baik karena kondisi eksternal seperti ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil maupun kondisi internal yang biasanya karena persepsi mereka sendiri yang membuat seakan-akan mereka tidak dapat maju atau berkembang. Selain itu Sumaryadi (Kiky, 2021:36-37) mengemukakan tujuan dan sasaran dari pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

Tujuan dari pemberdayaan yaitu :

- 1) Membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal, dan kaum kecil antara lain buruh tani, masyarakat terbelakang, masyarakat miskin;
- 2) Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Sedangkan sasaran dari pemberdayaan dalam mencapai kemandirian, yaitu :

- 1) Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat akar rumput dalam mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama;
- 2) Diperbaikinya kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan dan usaha-usaha kecil diberbagai bidang ekonomi ke arah swadaya, dan;
- 3) Ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktivitas dan pendapatan mereka.

3. Proses Pemberdayaan

Pada kegiatan pemberdayaan terdapat proses pemberdayaan yang didalamnya memiliki tahapan-tahapan. Adapun tahapan dalam proses pemberdayaan yang diungkapkan oleh Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (Anggraini dan Djumiarti, 2019:6) sebagai berikut :

- 1) Tahap Penyadaran, pada tahap ini penyadaran dilakukan dengan memberikan pemahaman dan motivasi bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjadi berdaya dan dapat keluar dari kondisi sulit atau dalam kemiskinan, tahap ini biasanya dilakukan melalui kegiatan pendampingan.
- 2) Tahap pengkapasitasan, kegiatan pada tahap ini yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan *lifeskill* dengan tujuan untuk memampukan masyarakat kurang mampu agar memiliki keterampilan.

- 3) Tahap Pendayaan, tahap ketiga lebih kepada pemberian peluang kepada masyarakat dengan memberikan peran lebih besar sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas didukung dengan akomodasi aspirasi dan panduan agar masyarakat dapat mengevaluasi diri terhadap bagian yang belum dilakukan maksimal.

Hogan juga menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama (Samantha, 2019:14-15), yaitu :

- 1) Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan (*recall depowering/empowering experience*)
- 2) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidak berdayaan (*discuss reasons for depowering/empowerment*)
- 3) Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identity one problem for project*)
- 4) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identity useful power base*)
- 5) Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).

Kemudian Sumodiningrat (Rifa'i, 2013:133) mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat setidaknya mencakup beberapa hal pokok yaitu : bantuan dana sebagai modal usaha, penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan, peningkatan kompetensi bagi aparat dan masyarakat serta penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat. Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu : Pertama, *Enabling*, yaitu menciptakan

suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang sama sekali tanpa daya karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, *empowering*, memperkuat posisi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar fisik seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Ketiga, *protecting*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada orang yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan

masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*) karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Teori yang dikemukakan oleh Sumodiningrat (Rifa'i, 2013:133) dipilih oleh peneliti untuk dijadikan sebagai fokus penelitian karena pada penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung bagi pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung sehingga menurut peneliti teori ini relevan dengan tema penelitian yang akan dilakukan.

4. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang sering digunakan guna menunjang keberhasilan dari kegiatan atau program tersebut. Said (2015:25-25) menjelaskan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan merupakan prinsip utama yang harus dipegang antara masyarakat dan lembaga penyelenggara dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Hubungan yang dibangun ialah hubungan yang saling mengakui kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak, saling mendukung dan mendorong dan berbagi berbagai informasi, pengetahuan serta pengalaman sehingga terjadi proses saling belajar. Dengan begitu apa yang menjadi tujuan dalam pemberdayaan masyarakat dapat tercapai.

2) Partisipasi

Prinsip yang kedua yaitu partisipasi dimana dari kegiatan pemberdayaan masyarakat secara tidak langsung dapat menstimulasi sifat mandiri dan partisipatif dari masyarakat yang membuat masyarakat dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi hingga mengevaluasi penerapan kegiatan tersebut yang dari awal hingga akhir dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Namun untuk sampai pada tahap tersebut diperlukan proses pendampingan dari pihak terkait dengan konsistensi dan komitmen yang tinggi sehingga nantinya dapat tercipta masyarakat yang berdaya.

3) Keswadayaan atau Kemandirian

Pada prinsip ini sangat mengutamakan dan mengedepankan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat daripada bantuan orang lain. Bukan karena tidak membutuhkan bantuan dari pihak lain tapi pada prinsip ini ingin lebih mengembangkan dan memaksimalkan potensi dalam setiap individu masyarakat. Bantuan dari orang lain digunakan hanya sebagai pendukung, potensi masyarakat yang harus digali dan dijadikan sebagai modal dasar bagi proses pemberdayaan dengan begitu akan tercipta pemberdayaan yang mampu membuat masyarakat menjadi pribadi yang mandiri dalam menghadapi permasalahan.

4) Berkelanjutan

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus memiliki sifat berkelanjutan agar dampak dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat dirasakan oleh target atau sasaran program yaitu masyarakat. Walaupun pada langkah awal pemberdayaan peran pendamping lebih dominan daripada masyarakat, namun apabila dilakukan secara berkelanjutan maka peran pendamping tersebut akan berkurang dan berganti menjadi peran masyarakat yang akan lebih dominan karena pemberdayaan masyarakat

merupakan proses kolaboratif hubungan antara pekerja sosial atau pemerintah daerah dan masyarakat harus terbangun sebagai *partner*.

5. Pendekatan Metodologi dan Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat

Pada proses pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya suatu mekanisme, cara, metodologi dalam penerapannya. Menurut M. Noor (96-97, 2011) terdapat beberapa pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1) Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu strategi dalam pembangunan yaitu bertumpu pada pemberdayaan masyarakat yang sering dipahami sebagai proses transformasi dalam hubungan sosial, politik masyarakat, ekonomi dan budaya dengan harapan dapat membawa perubahan secara struktural yang berlangsung secara alamiah. Konsep utama dari pendekatan pemberdayaan adalah “masyarakat tidak dijadikan objek dari proyek pembangunan melainkan subyek dari pembangunannya sendiri”. Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan adapun pendekatan yang hendaknya digunakan ialah :

Pertama, *targeted* yang memiliki arti bahwa upaya yang dilakukan harus terarah melalui perencanaan melalui program-program yang dirancang untuk mengatasi masalah yang ada sesuai dengan kebutuhannya.

Kedua, melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat sebagai sasaran dari program. Tujuannya adalah agar bantuan yang diberikan bisa dirasakan secara efektif oleh masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan mereka sekaligus meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri serta perekonomian mereka.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara individual masyarakat yang kurang berdaya sulit mengatasi masalahnya sendiri. Pendekatan kelompok digunakan juga bisa saling menguntungkan dan memajukan antar kelompok.

2) Metodologi Evaluatif dalam Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat dua metode evaluatif yang bersifat *bottom up* yaitu: **Pertama**, metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA) yang mana penggunaan metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi secara akurat dengan waktu yang terbatas. Metode ini dapat digunakan sebagai metode belajar yang intensif dalam memahami kondisi masyarakat dengan dilakukan secara berulang-ulang dan cepat, memilih teknik dan cara yang tepat untuk meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masyarakat. Metode RRA ini memiliki tiga konsep dasar yang digabungkan dengan pengetahuan ilmiah adalah a). perspektif sistem, b). triangulasi dari pengumpulan data, c). pengumpulan data dan analisis secara berulang-ulang (*iterative*).

Kedua, metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA), konsepsi dasar dari metode ini ialah keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan dengan memberikan tekanan pada partisipasi dengan prinsip : belajar dari masyarakat, menjadikan pihak luar sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku, saling belajar dan saling berbagi pengalaman, melibatkan semua kelompok masyarakat, bersifat bebas dan informal, menghargai perbedaan dan triangulasi. Metode PRA dibangun berdasarkan a). kemampuan masyarakat setempat, b). penggunaan teknik-teknik fasilitatif dan partisipatoris, c). pemberdayaan masyarakat setempat dalam prosesnya.

2.4. Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini. Sementara Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun kriteria UMKM seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM yaitu :

- 1) Kriteria Usaha Mikro ialah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil ialah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah ialah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pada penyelenggaraan suatu kegiatan hal utama yang ingin didapat ialah suatu manfaat. Manfaat UMKM menurut Absah, dkk (Samantha, 2019:10-11) adalah :

1) Membuka lapangan pekerjaan

UMKM dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah sosial yaitu pengangguran yang jumlahnya tidak sedikit, dengan adanya UMKM sudah pasti membuka kesempatan kerja bagi masyarakat secara lebih luas karena dalam UMKM kualifikasi pendidikan untuk tenaga kerjanya tidak diharuskan memiliki riwayat pendidikan yang tinggi tetapi tenaga kerja yang terlatih dengan kualifikasi pendidikan rendah pun diberi kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka.

2) Menjadi penyumbang terbesar nilai produk domestik bruto

Sebagai salah satu negara yang menjadi anggota G20 yang merupakan kumpulan 20 negara penghasil Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia, Indonesia harus menjaga kestabilan perekonomian negara. Melalui kegiatan UMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu opsi untuk terus menstabilkan nilai PDB karena dari PDB inilah kekuatan ekonomi suatu negara dilihat.

3) Salah satu solusi efektif bagi permasalahan ekonomi masyarakat kelas kecil dan menengah.

UMKM merupakan usaha dengan skala mikro hingga menengah yang dapat dilakukan oleh siapapun tanpa memerlukan modal yang besar, yang terpenting ialah adanya inovasi-inovasi yang terus dilakukan karena seorang wirausaha harus memiliki pemikiran yang kreatif dan dapat melihat peluang pasar serta semangat usaha yang tinggi sehingga usaha yang dijalankan akan terus berlanjut.

UMKM akan berjalan dengan maksimal tergantung dengan para pelaku UMKM itu sendiri. Prawirokusumo (Samantha, 2019:12) mengemukakan karakteristik pelaku UMKM yang dapat membuat usahanya terus berjalan, yaitu diantaranya :

- 1) Fleksibel, arti dari fleksibel sendiri lebih kepada tidak gampang terikat atau berpatokan hanya satu usaha itu saja yang ingin dijalankan. Pelaku UMKM harus dapat beradaptasi dan selalu ingin mencoba usaha lain jika usaha yang sudah dijalankan gagal atau tidak berkembang sehingga dengan begitu kemampuan yang ternyata belum disadari dapat tersalurkan.
- 2) Permodalan, hal utama dalam membuka usaha ialah tentang permodalan. Selalu usahakan untuk tidak modal dari luar tetapi ia bisa berkembang dengan kekuatan modal sendiri.
- 3) Pinjaman Usaha, berkaitan dengan poin sebelumnya bahwa pelaku UMKM harus meminimalisir pinjaman untuk modal dengan bunga yang cukup tinggi. Saat ini pemerintah telah menyediakan pinjaman untuk membuka usaha tanpa bunga dan walaupun ada bunga yang ditawarkan tidak begitu besar.

2.5.Pemberdayaan UMKM

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan terkait pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung yaitu pemberdayaan UMKM dilakukan untuk memberi dorongan, memperkuat dan memantapkan organisasi, manajemen serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa perlindungan dan pemberdayaan UMKM didasarkan pada prinsip-prinsip :

- 1) Pemberian kesempatan berusaha; dan
- 2) Perlindungan dan legalisasi usaha.

Perlindungan dan pemberdayaan UMKM meliputi :

- 1) Pembinaan kelembagaan;
- 2) Pengembangan sumber daya manusia;
- 3) Fasilitasi pembiayaan atau permodalan;
- 4) Pengembangan penerapan teknologi;
- 5) Pengembangan produksi;
- 6) Fasilitasi pemasaran dan promosi;
- 7) Perlindungan usaha; dan
- 8) Fasilitas Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Kegiatan Perlindungan dan pemberdayaan UMKM meliputi :

- 1) Meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia pada UMKM;
- 2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi UMKM;
- 3) Penerapan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan produktifitas bagi UMKM;
- 4) Pengembangan sarana dan prasarana produksi bagi usaha UMKM; dan
- 5) Fasilitasi pemasaran dan promosi produk-produk unggulan UMKM.

Adapun Pemberdayaan UMKM melalui strategi pengembangan ekonomi rakyat dalam pembangunan UMKM menurut Kartasmita (Kiky, 2021:38-39) harus meliputi aspek-aspek diantaranya :

- 1) Peningkatan akses terutama tentang modal, pemahaman penggunaan teknologi dan manajemen.
- 2) Pemberian pelatihan mengenai keterampilan dalam membuka usaha dan menjalankan usaha serta pemberian motivasi agar terus memiliki semangat dalam berusaha.
- 3) Dukungan melalui sarana dan prasarana guna memperlancar pemasaran produknya dan untuk meningkatkan kualitas produk secara berkala.

- 4) Memperkuat pasar dan disertai dengan pengendalian agar tidak terjadi kesenjangan dalam proses berjalannya
- 5) Membangun kemitraan usaha dan memperbanyak relasi menjadi hal utama untuk mengembangkan usaha ekonomi rakyat.

Purba (Samantha, 2019:15-16) menyatakan poin penting dalam pemberdayaan UMKM ialah untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengorganisir diri mereka sendiri. Program-program yang dijalankan juga harus membuat masyarakat dalam posisi sebagai subjek yaitu pelaku UMKM bukan objek yang memiliki makna yang berbeda. Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan pedoman peraturan daerah yang ada, perlindungan yang dilakukan dalam pemberdayaan didasarkan atas prinsip-prinsip dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2018 dengan tujuan UMKM yang dilakukan dapat membawa masyarakat Kota Bandar Lampung lebih berdaya.

2.6. Konsep Peran

1. Definisi Peran

Peran merupakan hak dan kewajiban yang ada pada sesuatu kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Peranan seseorang dalam posisi kemasyarakatan merupakan peran yang statis yang menunjukkan fungsi diri dan penyesuaian diri sebagai suatu proses. Soekanto (Nur, 2017:5859) berpendapat bahwa peranan mencakup tiga hal :

- 1) Peran mencakup norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, peranan ini merupakan rangkaian dalam peraturan yang membatasi kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh individu maupun organisasi.
- 3) Peranan merupakan suatu perilaku individu yang penting dari struktur sosial.

Gibson Invanchevich dan Donnelly (Lantaeda dkk, 2017:2) menjelaskan peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda biasanya organisasi. Sementara Riyadi (Lantaeda dkk, 2017:2) menjelaskan bahwa peran merupakan perilaku seseorang dalam kelompok kecil maupun besar yang memiliki suatu tuntutan yang diberikan secara struktural dan serangkaian tekanan serta kemudahan dalam oposisi sosial dan diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran ialah serangkaian tuntutan yang dilaksanakan oleh individu atau organisasi pada suatu fungsi secara struktural yaitu mencakup tanggung jawab hingga norma-norma dari posisi tersebut.

2. Jenis-Jenis Peran

Terdapat pembagian atau komponen dalam konsep peran. Menurut Sutarto (Lantaeda dkk, 2017:2) mengemukakan bahwa ada 3 komponen dalam peran itu sendiri yaitu :

- 1) Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan tergantung pada suatu situasi tertentu.
- 2) Harapan peran, yaitu harapan orang lain tentang tindakan yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap posisi yang sedang didudukinya.
- 3) Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya yang sudah atau sedang dijalani dari seseorang pada posisi tertentu.

Soekanto (Lantaeda dkk, 2017:2-3) peran memiliki jenis-jenisnya yang dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada seseorang pada kedudukan yang bersifat aktif seperti aktifis kelompok, seperti pengurus, pejabat, dsb.

2) Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada seseorang pada kedudukan yang peranannya sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3) Peran Pasif

Peran pasif adalah peran yang diberikan anggota kelompok kepada seseorang yang bersifat pasif biasanya anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

3. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM

Peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Peran juga dapat dikatakan sebagai penghargaan yang diberikan kepada seseorang. Dalam pemberdayaan UMKM terdapat peran dari pemerintah (Anggraeni dkk, 2021:62-63), yaitu sebagai berikut :

1) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Pada pemberdayaan UMKM pemerintah memiliki peran yaitu sebagai fasilitator dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuandar pemberdayaan itu sendiri yaitu pengembangan usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Fasilitator harus mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam proses pemberdayaan seperti lemah pada bidang produksi, lemah dalam hal pendanaan, dan sebagainya. Hal ini dapat diatasi melalui program pelatihan-pelatihan, pemberian bantuan modal atau disesuaikan dengan masalah yang dihadapi.

2) Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator dapat diwujudkan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang apabila kebijakan tersebut diterapkan dapat mempermudah pelaku UMKM dalam

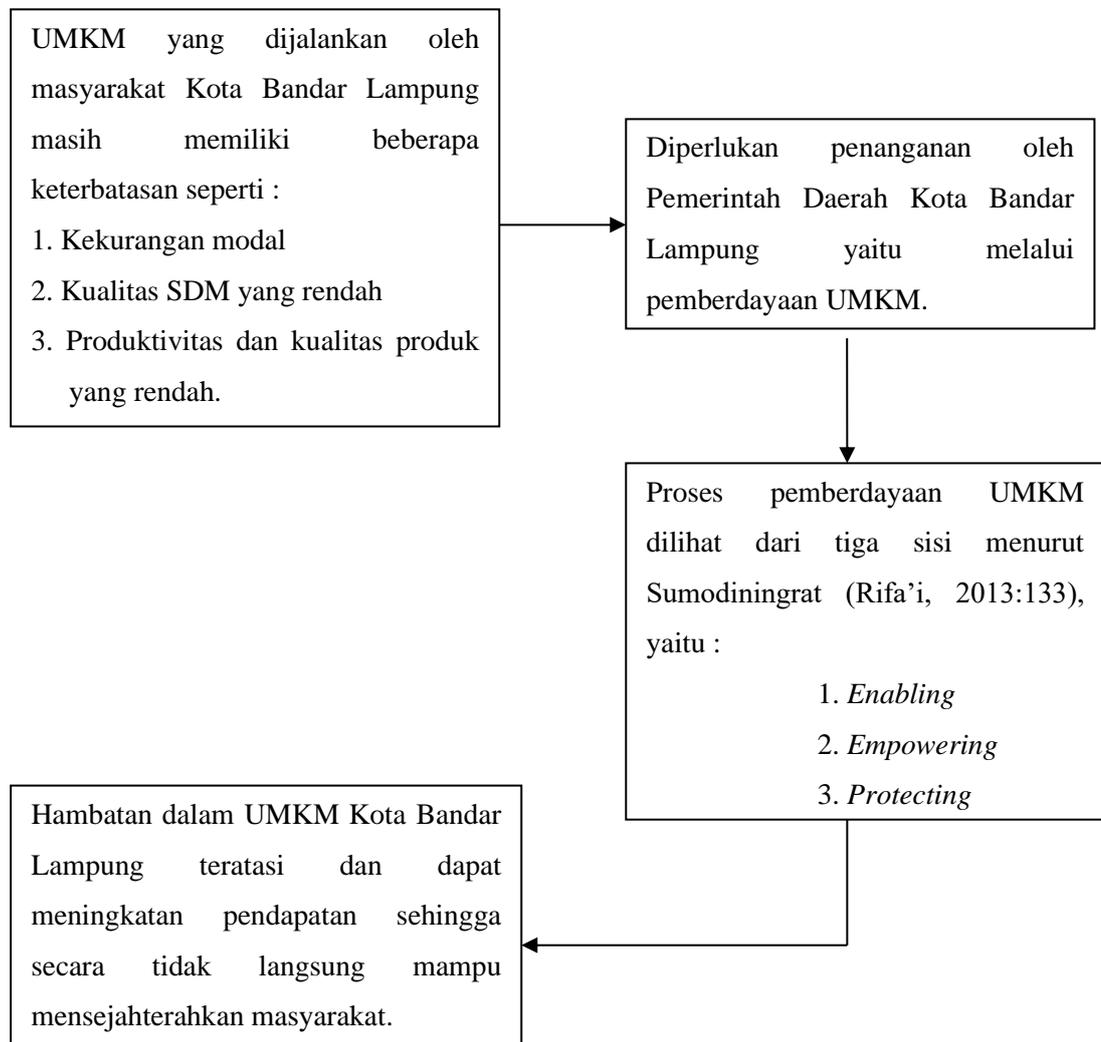
mengembangkan usahanya. Selain itu regulator juga memiliki fungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha agar tetap kondusif. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis.

3) Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Peran pemerintah daerah sebagai katalisator pemberdayaan UMKM adalah untuk mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. Untuk mencapai perkembangan *fast moving enterprise*, pemerintah daerah hanya ikut terlibat dalam sebagian prosesnya saja tetapi tidak terlibat terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya.

2.7. Kerangka Fikir

Kesejahteraan yang belum dimiliki oleh masyarakat membuat masyarakat masih harus terus berusaha melakukan inovasi atau upaya dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian mereka. Membuka usaha dengan skala menengah ke bawah dan menjadi pelaku UMKM menjadi salah satu alternatif agar mereka tetap mendapatkan pemasukan walaupun terkadang dengan modal yang tidak begitu banyak. Pada hal ini pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya memberikan perhatian lebih terhadap usaha yang dilakukan masyarakat yaitu dengan memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan harapan hal tersebut dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik suatu kerangka fikir sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Fikir

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2022.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Guna memecahkan masalah dalam suatu penelitian ilmiah, metode memiliki peran yang sangat penting sebagai alat untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dirasa sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan karena penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis secara tepat dan rinci (lengkap) melalui wawancara dengan informan, melakukan observasi serta mengumpulkan dokumentasi untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan mengenai Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian ini memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. Menurut David Williams (Moleong, 2016:5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Menurut Strauss dan Corbin (Tresiana, 2013:14) penelitian kualitatif adalah sebagai penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif menunjukkan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku juga tentang fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial atau

hubungan kekerabatan. Sementara Denzin dan Lincoln (Moleong, 2016:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif ialah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara alamiah tentang fenomena masyarakat, sosial, organisasi yang tidak dapat dilakukan dengan prosedur analisis statistik maupun cara-cara kuantifikasi lainnya.

3.2.Fokus Penelitian

Adanya fokus penelitian dalam suatu penelitian ilmiah berguna untuk memberikan batasan antara fokus yang bersifat umum dan fokus yang mengarah pada penelitian yang sedang dilakukan. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada 3 proses dalam pemberdayaan Menurut Sumodiningrat (Rifa'i, 2013:133) yaitu :

- 1 *Enabling*, pada poin ini peneliti ingin melihat langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam membangun kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga dapat berkembang dan potensi yang dimiliki dapat tersalurkan.
- 2 *Empowering*, pada poin ini peneliti ingin mengetahui apa saja sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung.
- 3 *Protecting*, pada poin ini peneliti ingin mengetahui bagaimana Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memberikan perlindungan bagi pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung dalam mengembangkan usahanya.

Selain 3 proses pemberdayaan dalam memberdayakan UMKM di Kota Bandar Lampung, yaitu fokus penelitian juga berfokus pada Faktor

penghambat dalam pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung.

3.3.Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ialah bertempat di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Dokter Susilo No. 2 Tanjung Karang, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dan beberapa tempat usaha pelaku UMKM sebagai sample.

3.4.Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2016:157) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut :

1 Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari tempat penelitian melalui wawancara dengan informan dan catatan di lapangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan dengan informan yang mengetahui secara baik tentang Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dan telah dipilih dengan mendasar serta bersedia memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti.

2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap untuk mencari fakta yang sebenarnya dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya yang didapat dari pihak selanjutnya bukan pihak utama. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari arsip, dokumen-dokumen, atau catatan apapun yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1 Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Menurut Patton (Moleong, 2016:190) menjelaskan peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat. Jenis ini dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel yang representatif ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan hal ini penting sekali. Semua aspek dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

Tabel 3. Informan Penelitian

| NO | NAMA INFORMAN/JABATAN | SUBSTANSI | WAKTU WAWANCARA |
|----|---|--|-------------------------------------|
| 1. | Ibu Nur Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Pada Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM. | Profil Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung dan upaya yang dilakukan dalam proses pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung. | 19 Oktober 2022 pukul 09.48 wib. |
| 2. | Ibu Ana Pelaku UMKM | Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung dan sampai ke para pelaku UMKM. | 21 Oktober 2022 pukul 11.00 wib. |
| 3. | Ibu Risma Pelaku UMKM | Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung dan sampai ke para pelaku UMKM. | 21 Oktober 2022 pukul 11.00 wib. |

| NO | NAMA INFORMAN/JABATAN | SUBSTANSI | WAKTU WAWANCARA |
|----|-------------------------|---|-------------------------------------|
| 4. | Ibu Vivi Pelaku UMKM | Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung dan sampai ke para pelaku UMKM. | 21 Oktober 2022 pukul 11.00 wib. |

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2022.

2 Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan secara langsung oleh peneliti untuk mencocokkan data yang didapat dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Teknik observasi ini memiliki ciri yang lebih spesifik yaitu tidak terbatas pada orang dan objek lainnya serta selain mengandalkan pengamatan juga mengandalkan ingatan. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi tentang pemberdayaan dan cara berinteraksi atau komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung kepada para pelaku UMKM.

3 Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai pencarian data yang bukan berdasarkan pemikiran sendiri yaitu berupa dokumen kantor, fotografi, video dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

Tabel 4. Data Dokumen Penelitian

| NO | DOKUMEN | SUBSTANSI |
|----|---|--|
| 1. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. | Tentang proses pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung. |
| 2. | Profil Dinas Koperasi dan | Berisi tentang sejarah, |

| NO | DOKUMEN | SUBSTANSI |
|----|--------------------------|--|
| | UMKM Kota Bandar Lampung | visi, misi, dan sebagainya. |
| 3. | Foto-foto kegiatan | Foto yang menggambarkan proses pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung. |

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2022.

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen (Moleong, 2017:248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data, yaitu :

1 Klasifikasi Data

Pada proses ini peneliti harus dapat memilah-milah data untuk membuat perbandingan yang bermakna antara setiap bagian dari data untuk kemudian memadukannya kembali agar menjadi lebih efisien dan sesuai serta data yang kurang penting dapat ditinggalkan. Dalam data yang telah dipilah selanjutnya akan dilakukan analisis berdasarkan landasan konseptual yang telah ditentukan.

2 Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif penyajian data disajikan dalam bentuk berupa uraian atau teks naratif namun tidak memungkinkan dapat berbentuk tabel, bagan, grafik, matrik dan yang lain. Penyajian data digunakan untuk memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dalam penelitian sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya.

3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Setelah melalui kegiatan gambaran secara utuh terkait fenomena yang diteliti dalam penyajian data, langkah selanjutnya ialah menarik kesimpulan dari fenomena tersebut. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah serta mengambil intisari dari isi yang termuat dalam penelitian tersebut.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Perpanjangan Pengamatan

Pada perpanjangan pengamatan dapat membuat hubungan antara peneliti dengan informan akan semakin akrab, semakin terbuka, dan saling timbul kepercayaan dikarenakan pada teknik ini peneliti akan kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan kembali, melakukan wawancara dengan informan kembali untuk mendapatkan informasi atau data yang baru sehingga informasi atau data yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Pengecekan data triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :

1) Triangulasi Sumber

Teknik triangulasi sumber ialah menggali dan mengecek kembali data yang telah diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, dokumen, arsip, hasil observasi untuk selanjutnya dideskripsikan dan dikategorikan agar mendapatkan hasil yang lebih konkrit dan spesifik agar dapat diambil kesimpulan.

2) Triangulasi Teknik

Teknik triangulasi teknik berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan sumber data yang sama. Seperti mengecek hasil wawancara dengan hasil observasi serta data yang didapat dari dokumentasi lalu kemudian dibandingkan untuk menemukan kekonsistenan data.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Setelah melakukan penelitian dengan mengacu pada tahap dalam proses pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sumodiningrat (Rifa'i, 2013:133) dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung belum maksimal karena apabila merujuk pada proses-proses pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung masih terdapat beberapa hal *urgent* yang perlu diperbaiki seperti pembinaan yang belum dilakukan secara berlanjut, pemberian bantuan penambahan modal yang belum merata hingga belum adanya perlindungan bagi para pelaku usaha.

Pada tiga point yang ada dalam teori yang dikemukakan oleh Sumodiningrat (Rifa'i, 2013:133) tersebut menurut peneliti upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung baru satu point yang sesuai dengan teori yaitu point *empowering* yang diterapkan cukup baik yaitu dengan memberikan kemudahan dalam perizininan usaha serta pemberian bantuan berupa modal usaha. Sementara upaya dalam melindungi UMKM belum menjadi perhatian oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dan masih banyak hal yang harus diperbaiki.

2. Faktor penghambat dalam proses pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung berupa keterbatasan modal, Sumber daya manusia (SDM), kualitas produk yang masih kurang menarik, dan kurangnya kebijakan yang dibuat pemerintah terkait pemberdayaan UMKM. Selain itu factor lain salah satunya kinerja dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang belum maksimal. Kegiatan yang dilakukan belum bersifat berkelanjutan dan masih kurangnya perhatian Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung kepada pelaku UMKM dengan belum adanya program perlindungan untuk para pelaku usaha.

5.2. Saran

Adapun beberapa saran yang perlu disampaikan oleh peneliti yaitu :

- 1 Perlu disusun dan diperjelas segera mungkin mengenai alur atau rencana dan teknik implementasi program-program atau kegiatan-kegiatan pendampingan yang perlu dilakukan dalam proses pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung yang lebih terjadwal dan sistematis.
- 2 Perlu dilakukan evaluasi mengenai kinerja dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dengan melibatkan para pelaku usaha untuk mengetahui apa-apa saja kekurangan-kekurangan dalam melakukan tugas dan bagaimana cara mengatasinya.
- 3 Perlu dilakukan peningkatan kompetensi para pegawai dengan memberikan pelatihan atau semacam diklat dan sebagainya agar masing-masing pegawai dapat mengetahui apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan kepada para pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Nurdiyah, N. (2021). Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47-65.
- Anggraini, F. F., & Djumiarti, T. (2019). The Process Of Community Empowerment In Integrated Waste Management In The Pedurungan Kidul Village Semarang City. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1), 329-342.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. *Jurnal Medtek*, 2(1), 1-13.
- Fatmawati, F. (2011). Kemitraan Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Penjelajahan Teoritik. Otoritas: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Ghassani, N., & Wardiyanto, B. (2015). Kemitraan Pengembangan UMKM. *Studi Deskriptif tentang Kemitraan PT. PJB (Pembangkit Jawa Bali) Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik. Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2), 142-151.
- Halim, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten mamuju. *GROWTH jurnal ilmiah ekonomi pembangunan*, 1(2), 157-172.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Makassar: CV Nur Lina.
- Kiky, Fahriza. (2021). Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Kota Pekanbaru. *Skripsi*. Tidak Diterbitkan. FEIS. UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Moeloeng, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2).
- Muhammad, Farid S. (2015). Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Dinas KOPERINDAG Kabupaten Maros (Studi Kasus Pada Sektor Perdagangan). *Skripsi*. Tidak Diterbitkan. FISIP. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Musa, M. (2017). Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat. *MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN*, 8(1), 107-125.
- Nur, D. S. (2017). peran Dinas Koperasi Dan UKM dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 5844.
- Pratiwi, H. K. W. A., Gani, A. J. A., & Said, A. (2013). Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota... Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(2), 213-220.
- Samantha, Immanuel. (2019). Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Medan (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan). *Skripsi*. Tidak Diterbitkan. FISIP. Universitas Sumatera Utara: Medan.
- Sore, Uddin B., dan Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makasar: CV SAH MEDIA. (e-book, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=N1RtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=konsep+kebijakan+publik+Uddin+B+sore&ots=u2_VvIGboE&sig=cPLqJZ_-YCAMCfuQeVvHVIWmQg0&redir_esc=y#v=onepage&q=konsep%20kebijakan%20publik%20Uddin%20B%20sore&f=false diakses 27 Juli 21.17 wib).
- Sulandjari, dkk. (2021). *Ekonomi Lingkungan*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA. (e-book https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hZY2EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA33&dq=tujuan+pemberdayaan+&ots=ACwFQR-tIP&sig=vf-HmfMwwH6sEPw4t-XUuSf-GxU&redir_esc=y#v=onepage&q=tujuan%20pemberdayaan&f=false diakses tanggal 27 Juli 2022 pukul 10.28 wib).
- Suryani, E. (2006). *Analisis Total Faktor Produktivitas Dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 93-105.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep dasar kebijakan publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal publik*, 11(1), 1-12.
- Rasdi, D., & Kurniawan, T. (2019). Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(2).
- Rifa'i, B. (2013). Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Sumber*, 100(100), 2-59.
- Tresiana, Novita. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.